

Busyro Muqoddas: Akar Terorisme Harus dilihat Secara Jernih

Selasa, 12-04-2016

Jakarta -- Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas menyampaikan, akar terorisme di Indonesia harus dilihat secara jernih dan perlu pendekatan yang menyeluruh untuk bisa menangkal aksi aksi terorisme yang terjadi. Hampir dua puluh tahun program deradikalisasi telah digulirkan, dan belum ada tanda – tanda lebih baik situasinya.

Hal tersebut disampaikan Busyro Muqoddas kepada Muhammadiyah.id selepas jamaah sholat Subuh di Gedung PP Muhammadiyah Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat, Selasa (12/4). Busyro mengatakan, selama ini masyarakat hanya memahami kesenjangan dan ketidakadilan serta yang menjadi salah satu sebab akar terorisme di Indonesia.

“Selama ini penanganan kasus terorisme yang sudah berlangsung hampir dua puluh tahun ini terkesan tertutup dan tidak transparan, sehingga membuat kecurigaan kecurigaan yang mengarah pada ketidakpercayaan beberapa segmen masyarakat,” paparnya.

Busyro menambahkan, banyaknya terduga yang mati sebelum masuk pengadilan menambah besarnya desakan dari elemen masyarakat untuk mengevaluasi kebijakan program anti teroris dan deradikalisasi yang telah berlangsung selama ini. “Kita tidak sepakat dengan terorisme, tetapi kita juga tidak sepakat cara – cara antiteroris yang dilakukan tidak profesional dan martabat,” tegasnya.

Undangan Komisi III

Rencananya Muhammadiyah akan menghadiri undangan Komisi III DPR RI siang ini dengan agenda dengar pendapat mengenai advokasi yang dilakukan Muhammadiyah pada keluarga Siyono. “Kita mengapresiasi DPR RI melalui Komisi III yang mengundang dan ingin mendengar langsung elemen masyarakat sipil terhadap kasus yang berkembang di masyarakat, dan kita akan memenuhi undangan tersebut,” kata Busyro.

Rencananya Muhammadiyah bersama tim advokasi kemanusiaan juga dengan elemen masyarakat lainnya akan menjelaskan hal hal yang terkait dengan apa saja yang telah dilakukan Muhammadiyah, termasuk hasil autopsi terhadap jenazah Siyono.

“Kita selalu memberikan yang terbaik untuk perbaikan bangsa ini, dan sudah dilakukan sejak sebelum Negara ini berdiri,” jelasnya.

Muhammadiyah menurut mantan Ketua KPK RI ini, telah menyepakati negara Pancasila dan telah ditegaskan dalam Muktamar terakhir di Makassar sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah sehingga tidak perlu diragukan komitmen terhadap bangsa.(mac)